

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik *Online Single Submission (OSS)* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Birokrasi

Implementasi Kebijakan *Online Single Submission* di Kabupaten Timor Tengah Utara pada fokus birokrasi kurang maksimal. Sasaran dari kebijakan ini tidak terpenuhi dan masih banyak masyarakat yang tidak dapat menerima kebijakan ini hal ini disebabkan karena terbatasnya peranan dari pihak birokrasi dalam implementasi kebijakan *Online Single Submission*.

2. Sumber Daya

Implementasi Kebijakan *Online Single Submission* pada fokus sumber daya belum bisa dikatakan maksimal karena tidak adanya personel dengan kemampuan khusus dan fasilitas memadai untuk menunjang pelaksanaan kebijakan OSS di Kabupaten TTU sehingga program ini bisa berjalan efektif.

3. Sikap Pelaksana

Implementasi suatu kebijakan dapat berhasil secara efektif dan efisien apabila pelaksananya mampu dan mau untuk melaksanakan kebijakan tersebut namun pada kenyataan para pelaksana mau melaksanakan kebijakan ini namun karena

terbatasnya peran yang dimiliki serta minimnya pengetahuan mengenai kebijakan ini untuk membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi masyarakat.

4. Komunikasi

Walaupun sudah mulai banyak yang menggunakan kebijakan ini namun tetap masih ada yang menggunakan cara manual dalam pembuatan surat izin berusaha hal ini disebabkan karena bentuk komunikasi yang kurang jelas dan konsisten oleh pelaksana sehingga belum sepenuhnya diterima dengan baik oleh masyarakat.

5. Lingkungan Kebijakan

Mengacu pada fokus lingkungan kebijakan, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang tidak sepenuhnya memadai menyebabkan masyarakat sulit menerima kebijakan ini, dukungan publik belum sepenuhnya diberikan untuk kebijakan ini, serta tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor belum maksimal untuk menunjang implementasi kebijakan *Online Single Submission*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya simpulkan di atas, maka penulis menyarankan :

1. Kepada Lembaga OSS, untuk memberikan lebih luas ruang gerak atau peran bagi Dinas PMPTSP di daerah sehingga pihak birokrasi di daerah bisa

terpacu untuk berperan aktif dalam pelaksanaan OSS di daerah masing-masing.

2. Kepada Lembaga OSS, agar menyediakan tim dengan kemampuan khusus di setiap daerah serta fasilitas yang memadai untuk menunjang pelaksanaan OSS.
3. Kepada Lembaga agar memberikan pelatihan khusus kepada implementor mengenai kebijakan OSS serta menyediakan pendanaan untuk kegiatan OSS.
4. Kepada pihak Dinas PMPTSP agar menambah metode komunikasi kepada masyarakat dengan cara membuat brosur, spanduk, atau dengan sosialisasi *door to door* serta membuat pelatihan kepada masyarakat berkaitan dengan pembuatan surat izin berusaha secara Online Single Submission.
5. Kepada pihak Dinas PMPTSP agar menyediakan data Indeks Kepuasan Masyarakat untuk menambah dukungan publik terhadap kebijakan OSS.
6. Kepada masyarakat agar tidak acuh dan mau membuka diri menerima kebijakan ini dengan belajar atau mencari informasi mengenai kebijakan ini untuk dapat dipahami dan diterapkan dalam proses pembuatan surat izin berusaha secara online.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Yunus. (2012). *Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan Karakter*. Bandung: Refika Aditama
- Agustino, Leo.2008.*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*.Alfabet:Bandung
- Arifin Tahir.2011.*Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.PT Pustaka Indonesis Press:Jakarta.
- Edwar N Gladen dalam RiantNugroho.2012.*Public Policy*. PT Elex Media Komputindo(Kompas Gramedia): Jakarta.
- Edwards III, G.C.1980. *Implementing Public Policy*. Congressional QuarterlyPress:Washington.
- Grindle, M.S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princeton University Press: New Jersey .
- H.B.Sutopo.2002.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.UNS Press:Surakarta.
- H.Tachjan.2006. *Implementasi Kebijakan Publik*.AIPI Bandung PUSLIT KP2W LEMLIT UNPAD: Bandung
- Inu Kencana Syafiie.2006.*Ilmu Administrasi Publlik*.Rineka Cipta: Jakarta
- Iskandar.2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Gaung Persada Press:Jakarta
- Leo, Agustino. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung*: Alfabet
- Leo,Agustino.2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabet:Bandung.
- Moleong, Lexy.2002. *Metode Penelitian Kualitatif*.CV.Remaja:Bandung.
- Moleong, Lexy.2004. *Metode Penelitian Kualitatif*.PT.Remaja Rosdakarya:Bandung.

- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho,Riant.2014.*Public Policy*. PT.Elex Media Komputindo : Jakarta
- Rusli,Budiman.2003. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Hakim Publishing:Jawa Barat
- Said Sainal Abidin 2012. *Kebijakan Publik Ed. 2*. Salemba Humanika:Jakarta
- Said Zainal Abidin. 2012. *Kebijakan Publik*, Salemba Humanika:Jakarta
- Samuel P Huntington 1968. *Political Order in Changing Societies*.Yale University:New Haven
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta:Bandung
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Isu*. Gava Media, Yogyakarta.
- Sugiyono.2004. *Metode Penelitian*. Alfabeta:Bandung.
- Tachjan. (2006). *Implementasi kebijakan publik*. Bandung: AIPI.
- Winarno.2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*.Media Press:Yogyakarta.

Sumber Lain :

Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik